

**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL,
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSPEKTORAT KOTA MALANG**

Maria Novriana Mina

Email: minanovriana30@gmail.com

Anwar Made

Rita Indah Mustikowati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan Malang

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer, teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, selanjutnya dianalisis dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, secara parsial pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Kata kunci: *pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas kinerja.*

ABSTRACT

This research was conducted to examine and determine the effect of functional supervision, financial management, and clarity of budget targets on the performance accountability of the Inspectorate of Malang. This type of research is quantitative research, the source of the data used is primary data, sampling techniques using total sampling method, then analyzed with multiple linear regression models. The results showed that functional oversight, financial management and clarity of budget objectives simultaneously affect performance accountability, functional supervision partially influences performance accountability, financial management influences performance accountability and clarity of budget targets affects performance accountability.

Keywords: *functional supervision, financial management, clear budgetary objectives, performance accountability.*

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap negara juga menuntut daya saing disetiap pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Fenomena yang terjadi ditahun lalu cukup banyak menyedot perhatian masyarakat Malang, diketahui bahwa postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun 2018 masih didominasi kebutuhan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung menyedot anggaran sekitar Rp 2,1 triliun atau 56,76% yang terbagi dalam enam pos dari total APBD sebesar Rp 3,7 triliun. Angka belanja tidak langsung tersebut membuat beberapa kalangan mengaitkannya dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Malang, khususnya di alokasi belanja pegawai ada penilaian besaran belanja pegawai tidak selaras dengan capaian yang diharapkan, hal ini terjadi masih lebih dominan belanja tidak langsung, untuk belanja langsung atau program bagi masyarakat angkanya turun dari Rp 1,143 triliun menjadi Rp 1,064 triliun. Belanja langsung masih ada juga jatah gaji atau tunjangan-tunjangan dari luar pokok gaji pegawai artinya tidak murni untuk masyarakat. Penggunaan sisah lebih pengguna anggaran (Slipa) sebagai penambal kebutuhan belanja dinilai merupakan imbas dari buruknya perencanaan program (Malang Times, 2 November 2018).

Akuntabilitas yang baik merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Peraturan Wali Kota Malang nomor 8 tahun 2016 tentang Piagam Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Malang).

Pengawasan fungsional sangat berperan dan memiliki kaitan langsung dengan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah yang memberi landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan tugas pengawasan keuangan pemerintah maupun pembangunan pemerintah, agar terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa (Halim, 2010). Maka hal tersebut, dapat menyimpulkan bahwa, Tujuan utama dari pengawasan fungsional untuk pemerintah yang akuntabilitas yaitu mengatur aparat pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga sebagai upaya *good governance*.

Pengelolaan pemerintah daerah yang akuntabilitas, juga tidak terlepas dari anggaran, Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dalam keberhasilan kejelasan sasaran anggaran maka diharapkan akan tercapainya tugas suatu organisasi sehingga akan mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien dan transparan.

Dari uraian tersebut peneliti dapat menulis rumusan masalah: 1. Bagaimana pengaruh pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan, kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Malang? 2. Bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Malang? 3. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat

Kota Malang? 4. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Malang?

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim (2010) *good governace* merupakan sesuatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dengan sejalan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. *Good governance* mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Menurut Mardiasmo (2009) *good governace* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan principal (Mardiasmo: 2004).

Akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam segala aktifitas yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah.

Akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengukuran akuntabilitas dapat diukur melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yaitu proses, program, kebijakan, hukum dan kejujuran.

Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pengawasan. Menurut Baldrick (2015) pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, BPK.

Pengawasan fungsional terdiri atas kegiatan pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, serta evaluasi yang diarahkan untuk menjegah timbulnya berbagai macam bentuk penyimpangan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan sudah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kejelasan sasaran anggaran

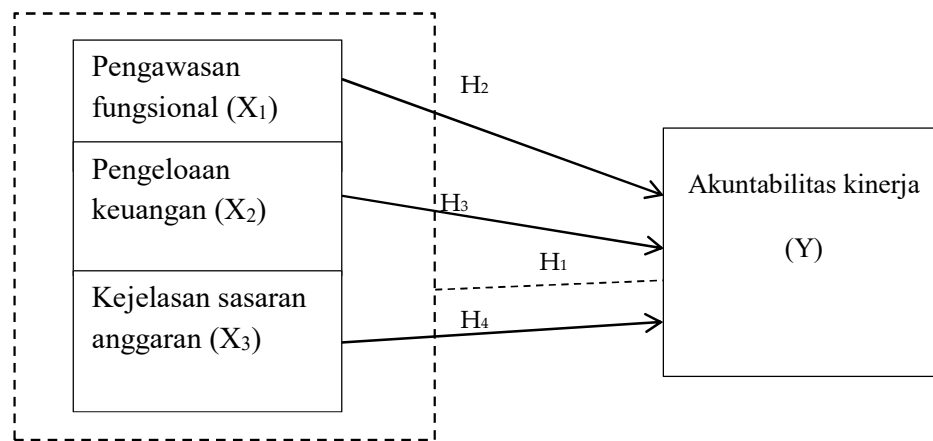
Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya pertimbangan kebutuhan pencapaian dimasa sekarang atau masa yang akan datang. Sasaran anggaran adalah hasil yang dicapai atau target yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Menurut Irine (2015) Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka, akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks Pemerintah Daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat.

Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan merupakan jumlah alokasi anggaran serta jumlah partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan mempunyai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sehingga menciptakan akuntabilitas yang tinggi

Pengelolaan keuangan yang diatur dalam peraturan menteri yang meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD. Menurut Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

HIPOTESIS PENELITIAN

1. Pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
2. Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
3. Pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
4. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu pengambilan data secara langsung dengan cara penyampaian kuesioner kepada responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur di inspektorat kota Malang yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode *total sampling*, menurut Ari Kunto (2012) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika jumlah populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% dari jumlah populasinya. Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya kurang dari 100 responden, maka peneliti mengambil semua jumlah

populasi yang ada di Inspektorat Kota Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan data yang pertama kali dikumpulkan, diperoleh atau dicatat oleh peneliti dari sumbernya langsung (Sarwoko, 2018). Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Malang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang diambil berdasarkan teori dan tinjauan dari peneliti terdahulu, data diperoleh dengan mengirim kuisioner secara langsung kepada setiap responden yaitu seluruh aparat Inspektorat Kota Malang, Masing-masing variabel diukur dengan skal likert yang mengatakan setuju atau tidak setuju, terhadap pernyataan yang akan diajukan dengan skor 1-5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui model regresi benar-benar menunjukkan hubungan signifikan dan representative.

Hasil uji multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Jika VIF > 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 4. 10
Hasil uji multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	23,255	5,996		3,879	,000		
PENGAWASAN FUNGSIONAL	,270	,094	,312	2,872	,006	,808	1,237
PENGELOLAAN KEUANGAN	,289	,090	,374	3,198	,003	,698	1,432
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	,318	,101	,334	3,155	,003	,851	1,176

Sumber : data primer diolah 2020

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai VIF pada kolom *Collinearity Statistic*, untuk variabel pengawasan fungsional nilai VIF sebesar 1,237, variabel pengelolaan keuangan nilai VIF sebesar 1,432, variabel kejelasan sasaran anggaran nilai VIF sebesar 1,176 karena setiap variabel lebih kecil dari 10 maka tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas.

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi terhadap gejala autokorelasi dilakukan dengan pengujian *Durbin Watson* (d). Hasil *Durbin Watson* (d) dibandingkan dengan nilai d tabel pada $\alpha = 0,05$, tabel d memiliki dua nilai yaitu nilai batas atas (d_u) dan nilai batas bawah (d_l) untuk berbagai nilai n dan k.

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

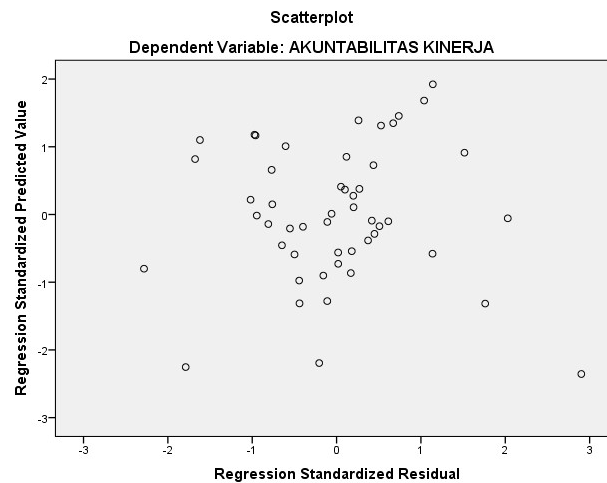
Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,749 ^a	,562	,533	5,460	1,938

Sumber: data primer diolah 2020

Dari tabel 4.11 dilihat nilai durbin watson 1,938, pengujian autokorelasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai durbin watson dengan nilai tabel (d_u dan d_l) pada taraf α dan $n = 50$. Nilai $d_u = 1,27$ dan nilai $d_l = 1,65$ karena nilai durbin watson lebih besar dari nilai d_u dan lebih kecil dari $4-d_u$ maka dapat dinyatakan model regresi bebas gejala autokorelasi.

Hasil uji heteroskedastisitas

Model regresi linear mengasumsikan bahwa varian residual bersifat konstanta atau sama, model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan metode scatterplot, jika grafik plot menunjukkan tidak beraturan maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada gambar:



Gambar 4.1
Hasil uji heteroskedastisitas

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa gambar *scatterplot* tidak beraturan dan membentuk suatu pola atau gambar tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Hasil uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,29014176
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,093
	Negative	-,066
Test Statistic		,093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 4. 12 Menunjukkan bahwa nilai signifikan *kolmogorov smirnov* sebesar 0,200 melebihi 0,05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian yaitu pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan, kejelasan sasaran anggaran secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu akuntabilitas.

1. Hasil uji simultan (f)

Uji f merupakan yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Uji f digunakan untuk menguji signifikan X terhadap Y, nilai signifikansi ditunjukkan dengan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Hasil uji simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1756,326	3	585,442	19,639	,000 ^b
	Residual	1371,294	46	29,811		
	Total	3127,620	49			

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa nilai signifikan uji F sebesar 0,000 lebih kecil *alpha* 0,05, jadi hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dapat diterima.

2. Hasil uji parsial (t)

a. Hasil uji hipotesis kedua

Uji hipotesis pertama menggunakan uji t memperhatikan tabel 4.13 terlihat bahwa nilai signifikan uji t sebesar 0,006 lebih kecil *alpha* 0,05, jadi hipotesis kedua yang menyatakan variabel pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dapat diterima.

b. Hasil uji hipotesis ketiga

Uji hipotesis kedua menggunakan uji t, memperhatikan tabel 4.13 terlihat bahwa nilai signifikan uji t sebesar 0,003 lebih kecil *alpha* 0,05, jadi hipotesis ketiga yang menyatakan variabel pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dapat diterima.

c. Hasil uji hipotesis keempat

Uji hipotesis keempat menggunakan uji t, memperhatikan tabel 4.13 terlihat bahwa nilai signifikan uji t sebesar 0,003 lebih kecil α 0,05, jadi hipotesis keempat yang menyatakan variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dapat diterima.

Tabel 4.2
Hasil uji parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	23,255	5,996		3,879	,000			
PENGAWASAN FUNGSIONAL	,270	,094	,312	2,872	,006	,503	,390	,280
PENGELOLAAN KEUANGAN	,289	,090	,374	3,198	,003	,634	,427	,312
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	,318	,101	,334	3,155	,003	,503	,422	,308

Sumber: data primer diolah 2020

Pengaruh Pengawasan Fungsional, Pengelolaan Keuangan, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil uji hipotesis pertama menyebutkan bahwa pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja yang didukung oleh data dengan kata lain bahwa hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas sebesar 0,562 sedangkan sisanya 0,438 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis kedua pengawasan fungsional berkontribusi terhadap akuntabilitas kinerja. Tabel analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai signifikansi variabel pengawasan fungsional sebesar 0,006 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$).

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis ketiga pengelolaan keuangan berkontribusi terhadap akuntabilitas kinerja. Tabel hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai signifikan variabel pengelolaan keuangan sebesar 0,003. Hal ini berarti semakin tinggi pengelolaan keuangan maka akuntabilitas kinerja yang dihasilkan semakin baik.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis keempat yang menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja berhasil didukung oleh data atau dengan kata lain hipotesis diterima. Tabel analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai signifikan variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,003 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$). Hal ini berarti semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja yang dihasilkan semakin baik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta
- Halim, Abdul. 2010. *Sistem Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Irene. 2015. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja di SKPD Merauke*. Jurnal disajikan dalam Seminar Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang
- MalangTimes 2 novemeber 2018.2,1 Triliun pendapatan daerah kabupaten malang tersedot belanja tidak langsung.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan walikota Malang No 8 tahun 2016 tentang Piagam Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Malang*. (Online), (hukum.malangkota.go.id), diakses 21 oktober 2019
- Sarwoko, Endi. 2018. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN